

BAB VI PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan;

- a. Kabupaten Tana Tidung belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.
- b. Berdasarkan pengkajian secara normatif dan praktek empiris, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan dengan prinsip hierarkisitas perundang-undangan.
- c. Masih terdapat lahan masyarakat dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK);
- d. Masih perlu kejelasan status HGU bagi Koperasi Plasma;
- e. Perlu Pengaturan harga barang barang komoditi
- f. Infrastruktur Banyak yang belum mendukung, termasuk PKS yang harus memakan waktu yang begitu jauh
- g. Kurangnya perhatian pemerinda Daerah terhadap pasokan bibit, pupuk dan pemasaran komoditi

b. Saran

- a. Menyusun Ranperda Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung dengan memperhatikan aspek hierarkisitas perundang-undangan.
- b. Perlu adanya upaya pemerintah yang memperjelas legalitas Hak Guna Usaha yang berada di Area Inti Plasma.
- c. Adanya program penyuluhan pertanian, serta kemudahan untuk mendapat bibit dan pupuk subsidi

***Executive Summary Draft Laporan Pendahuluan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Tentang Tata Kelola Perkebunan***

- d. Mengkondisikan Harga Komoditas Perkebunan, pemasaran dan Produksi hasil Pekebunan
- e. Koordinasi lintas sektor seluruh OPD terkait kelancaran Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung

DAFTAR PUSTAKA

- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2, Alumni, Bandung.
- Collin Mac Andrew, 1983, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Damanik, J., & Teguh, F. 2012. Manajemen Destinasi Perumahan dan pemukiman: Sebuah Pengantar Ringkas. Yogyakarta: Kepel Press.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saeful Hakim dan Dyah R dalam Perencanaan dan
- Hendrawan, Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, Mandar Maju, Bandung; 1994
- Manan, Bagir, Hukum Positif di Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta;2004
- Pengembangan Wilayah , Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Rahardjo, Satjipto, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Angkasa, Bandung ; 1986
- Rijadi, Prasetijo, Pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam Konteks Kota Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya; 2005
- Rinaldi, Hasymi, Panduan Pembuatan Peraturan Desa tentang RTRW Desa, JARI Borneo Barat, Pontianak 2014
- Sinulingga, Budi D, Pembangunan Kota dalam tinjauan Regional dan Lokal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 1999
- Soekamto, Sarjono dan Mamudji, Sri , Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, UI Press, Jakarta; 1986

- Soekamto, Sarjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta; 1986
- Sudrajad Sodik Ahmad dan Ridwan Juniarto, Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Penerbit Nuansa, Bandung; 2007
- Widyaningsih, Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan, Tarsito. Bandung. 2006.
- Yusuf, Asep Warlan. Pranata Pembangunan. Universitas Parahiyangan, Bandung: 1997
- Zulfie Syarief, Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, USU Press, Medan. 2000.

Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043).
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4725).

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433).
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613).
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6398).
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48).
 18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian.
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
Pertanian.

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Tana Tidung.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 – 2026.